

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh DLH Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 belum sesuai dengan mandat normatif yang berlaku secara hierarkis dari UU Pengelolaan Sampah, PP No. 81 Tahun 2012, hingga Perda itu sendiri. DLH membatasi kewajiban pengangkutannya hanya pada residu dan sampah B3 dengan menjadikan penyelesaian sampah organik dan anorganik oleh pengelola kawasan sebagai prasyarat layanan, serta menyerahkan penyediaan TPS kepada pengelola kawasan secara sepihak. Kebijakan ini menyimpang dari Perda Pengelolaan Sampah Bojonegoro yang menggunakan konstruksi kumulatif tanpa pengecualian kondisional apapun, sehingga penyempitan kewajiban yang diterapkan DLH tidak memiliki dasar normatif yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketidadaan Peraturan Bupati sebagai instrumen teknis yang diperintahkan juga memperparah kesenjangan implementasi karena membuka ruang bagi DLH untuk mendefinisikan sendiri syarat-syarat layanannya di luar batas yang diizinkan regulasi.

2. Faktor penghambat pelaksanaan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 bersifat struktural dan berlapis yang saling memperkuat satu sama lain. Menggunakan kerangka efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ditemukan empat faktor: faktor hukum berupa ketiadaan Peraturan Bupati yang mengosongkan panduan teknis operasional DLH; faktor sarana dan prasarana berupa armada bertonase besar yang tidak dapat menjangkau wilayah perdesaan sementara instrumen alternatif yang tersedia regulasi tidak dimanfaatkan; faktor masyarakat berupa rendahnya partisipasi pemilahan sampah yang tidak direspons dengan pembinaan aktif; serta faktor penegak hukum dan budaya hukum berupa gap interpretasi kebijakan DLH yang mereduksi cakupan kewajiban pelayanan secara sepihak dengan menjadikan kemampuan mandiri pengelola kawasan sebagai prasyarat yang tidak pernah dirumuskan pembentuk regulasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Perlu segera menerbitkan Peraturan Bupati yang mengisi delegasi teknis Perda Pengelolaan Sampah Bojonegoro, mencakup persyaratan teknis alat angkut, penyediaan TPS, perizinan pengelolaan sampah, dan tata cara peran serta masyarakat. Kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu menyusun Jakstrada

persampahan yang memuat target terukur serta mengalokasikan anggaran pengadaan kendaraan bertonase kecil sesuai rekomendasi Masterplan Persampahan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 guna menjangkau wilayah perdesaan yang selama ini tidak terlayani.

2. Kepada DLH Kabupaten Bojonegoro, perlu mengubah pendekatan kebijakan operasionalnya dari pasif-kondisional menjadi proaktif-fasilitatif dengan menjalankan kewajiban pengangkutan seluruh jenis sampah dari TPS tanpa prasyarat kondisional, sekaligus aktif melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pemilahan sampah kepada masyarakat sebagaimana diwajibkan Pasal 45 ayat (1) Perda Pengelolaan Sampah Bojonegoro. Kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro, perlu meningkatkan partisipasi aktif pemilahan sampah di sumber sebagai kewajiban yang secara tegas diamanatkan Pasal 44 Perda Nomor 7 Tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andriana, Denny. *Akuntabilitas Publik*. Diedit oleh Ali Hasan Zein dan T Yuliyanti. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2024.
- Baan, B., Tiyas Vika Widyastuti, dan Aah Ahmad Almulqu. *Asas dan Prinsip Hukum Lingkungan: Landasan Yuridis Perlindungan Ekologis*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2026.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Diedit oleh Ilyya Muhsin dan Seply Arsiantoro. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Moenek, Reydonnyzar, dan Dadang Suwanda. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Tarigan, Lidia Br, dan Olga Mariana Dukabain. *Pengelolaan Sampah Kreatif*. Diedit oleh Siprianus Singga, Eka Deviany Widyawaty, dan Upik Dariasih. Malang: Rena Cipta Mandiri, 2023.

2. Jurnal Ilmiah dan Artikel

- Amri, Sri Rahayu, dan Andi Sitti Umrah. “Studi Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok: Peran Kesadaran Dan Ketaatan Hukum.” *Dih: Jurnal Ilmu Hukum* (2022): 88–97.
- Astuti Handayani, T. “Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Konflik Antar Perguruan Pencak Silat Di Kecamatan Purwosari Kabupaten

Bojonegoro Terhadap Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.”
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum 3, no. 2 (2021): 10–18.
<https://doi.org/10.56071/justitable.v3i2.327>.

Aspek Hukum et al. “Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Limbah B3:
Evaluasi Terhadap Kebijakan Dan Sanksi Di Indonesia.”
Innovative: Journal of Social Science Research 5, no. 4 (2025):
12015–27. <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V5I4.21235>.

Efriliani, Firial Tiara, et al. “The Function of Legislation in Ensuring Legal
Certainty and Good Governance.” Media Hukum Indonesia (MHI)
4, no. 1 (2026): 644–656.

Faristiana, Andhita Risko, Dovano Anggres Wori, dan Linda Dwi Novita
Wardani. “Edukasi Klasifikasi Jenis-Jenis Sampah Dan Penyediaan
Tempat Sampah Dari Bahan Daur Ulang Di Desa Bungkok
Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.” SAFARI: Jurnal
Pengabdian Masyarakat Indonesia 3, no. 4 (2023): 110–24.
<https://doi.org/10.56910/SAFARI.V3I4.910>.

Fitri, Suci Emilia, dan Ray Ferza. “Dinamika, Problematika, Dan Implikasi
Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Di Daerah.” Jurnal
Kebijakan Pembangunan 15, no. 1 (2020): 11–24.

Fuah, Marfuah. “Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat
Perspektif Filsafat Hukum.” Desiderata Law Review 1, no. 2 (2024):
35–44.

Herdianto, Danto. “Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Tasikmalaya Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Dan Ketertiban Masyarakat.” *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 1, no. 3 (2024): 67–93.
<https://doi.org/10.1234/JPHGALUNGGUNG.V1I3.36>.

Hidayat, Susetyo. “Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik.” Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022.
https://www.arpusda.semarangkota.go.id/uploads/data_karya_ilmiah/20220712090654-2022-07-12data_karya_ilmiah090646.pdf.

Iqbal, Muhammad, Rosalina Kumalawati, dan Ellyn Normelani. “Analisis Ekonomi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Sampah Perkotaan Di Kota Semarang, Jawa Tengah: Implikasi Bagi Pembangunan Berkelanjutan.” *Kolaboratif: Jurnal Isu Sosial dan Tinjauan Kebijakan* (2023).
<https://kolaboratif.pelantarpress.co.id/Kolaboratif/article/view/51/64>.

Kasuma, M. Naufal Al-Hadi, Afdhal Fadhila, dan Nur Aini. “Kepastian Hukum Kebijakan Extended Producer Responsibility Bagi Produsen Penghasil Sampah.” *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* (2024).

Mansur, Mochammad, Irma Mangar, dan Pingkan Widya Pangestika. “Sosialisasi Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di

Indonesia Wilayah Hukum Desa Padang Kecamatan Trucuk.”
DARMADIKSANI 5, no. 4 (2025): 241–250.
<https://doi.org/10.29303/darmadiksani.v5i4.8941>.

Nathasya, Hervina. “Analisis Pengelolaan Sampah Domestik Di Kecamatan Tebing Tinggi.” Edu Research Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS). Politeknik Kesehatan Medan, 2024.

Nurhidayat, Ipan. “Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia.” Journal Education and Government Wiyata 1, no. 1 (2023): 40–52.
<https://doi.org/10.71128/E-GOV.V1I1.5>.

Prasetyo, Eko, dan Arif Sugitanata. “Urgensi Penerapan Good Governance Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia.” Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara 3, no. 1 (2022): 67–90.

Prasetyo, Yudi, Suwardi Suwardi, dan Herning Suryo Sardjono. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Indonesia.” JI@P 12, no. 2 (2023).

Purwendah, Elly Kristiani, dan Aniek Periani. “Kewajiban Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat.” Jurnal Pacta Sunt Servanda 3, no. 2 (2022): 70–77.
<https://doi.org/10.23887/JPSS.V3I2.5981>.

Rafdiansyah, Moh. Rayhan, dan Irfa Ronaboyd. “Prinsip Good Governance Dan Akuntabilitas Fiskal: Bukti Empiris Dari Pengelolaan

- Anggaran Kabupaten Sumenep.” JURNAL USM LAW REVIEW 8, no. 3 (2025): 2293–2313. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12968>.
- Rahman, Abd, Muhammad Fikri, dan Haura Mudya Maysa. “Anggaran Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Hak Konstitusional Masyarakat Kota Makassar.” Jurnal Nomokrasi 3, no. 2 (2025): 221–241.
- Ramadhan, Muhammad Bintang, et al. “Implementation of the Bengkulu City Government's Obligations Regarding the Provision of Temporary Waste Collection Sites (TPS) Under Law No. 18 of 2008 on Waste Management.” TOFEDU: The Future of Education Journal 5, no. 2 (2026): 1757–1767.
- Rohman, M. Kholilur, et al. “Penegakan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik Ditinjau Dari Permenhub No. 45 Tahun 2020 Di Satlantas Bojonegoro.” PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora 4, no. 2 (2025): 2710–2719. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.7401>.
- Sahidin, La Ode, Haeruddin, dan Abdul Nashar. “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance Pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Kendari.” Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora 5, no. 2 (2025): 2819–28. <https://doi.org/10.57250/AJSH.V5I2.1554>.
- Salasa, Nurfani, Muhsin N. Bailusy, dan Suratno Amiro. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur.” EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan 11, no. 2 (2024): 540–575.

Sari, Puspita, et al. “Tampilan Pemerataan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Di Indonesia.” Jurnal Adijaya Multidisiplin (2025).
<https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/jam/article/view/1785/721>.

Satmaidi, Edra, et al. “Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Guna Mendukung Program Wisata Kawasan Pesisir Provinsi Bengkulu.” Bina Hukum Lingkungan 6, no. 1 (2021): 1–21.

Silalahi, Wilma, dan Gladwin Wijaya. “Optimalisasi Pemanfaatan Pajak Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara: Antara Prinsip Keadilan Fiskal Dan Akuntabilitas Publik.” Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial 3, no. 3 (2025): 218–228.
<https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i3.165>.

Sumarna, Dadang, dan Ayyub Kadriah. “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.” Jurnal Serambi Hukum (2023).
<https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/730/510>.

Syahputra, Utama, et al. “Penerapan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Standar

- Pelayanan Pemerintah Terhadap Masyarakat.” *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 117–122.
- Trisakti, Fadjar, et al. “Pentingnya Etika Dan Akuntabilitas Di Indonesia.” *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 1 (2023): 25–36.
<https://doi.org/10.63309/DIALEKTIKA.V21I1.128>.
- Wibowo, T., I. Mangar, dan M. Rhozaq. “The Impact of the Global Energy Crisis on Energy Law Policy and Regulatory Effectiveness in Indonesia.” *Journal of Development Research* 10, no. 1 (2026): 92–99.
- Yasin, Bukhari. “Penerapan Sistem Informasi Desa Sebagai Salah Satu Media Informasi Desa Menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Informasi Desa Di Kabupaten Bojonegoro.” *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 41–48. <https://doi.org/10.56071/justitable.v4i2.345>.
- Yasin, Bukhari, dan Andrianto Prabowo. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan sebagai Upaya Mencegah Peraturan Daerah Bermasalah di Kabupaten Bojonegoro.” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9, no. 2 (2020).
<https://doi.org/10.55129/jph.v9i2.1202>.
- Yuliyanti, Mela, Dini Anggraeni, dan Ika Feni Setiyaningrum. “Kajian Analisis Pengelolaan Sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan.” *SEMNAS 7* (2024).

<https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/viewFile/1819/1824>.

3. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

4. Website

Admin. “Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.”

dinkonminfo, 2023.

<https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/berita/baca/1176>.

Alhgivari, Hakam. “65 Ton Sampah Per Hari Di TPA Banjarsari

Bojonegoro, Diprediksi Hanya Mampu Sampai 2025 - Radar

Bojonegoro.” radarbojonegoro, September 21, 2023.

[https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/713006623/65-ton-](https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/713006623/65-ton-sampah-per-hari-di-tpa-banjarsari-bojonegoro-diprediksi-hanya-mampu-sampai-2025)

[sampah-per-hari-di-tpa-banjarsari-bojonegoro-diprediksi-hanya-](https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/713006623/65-ton-sampah-per-hari-di-tpa-banjarsari-bojonegoro-diprediksi-hanya-mampu-sampai-2025)

[mampu-sampai-2025](https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/713006623/65-ton-sampah-per-hari-di-tpa-banjarsari-bojonegoro-diprediksi-hanya-mampu-sampai-2025).

Andriana, Denny. “Akuntabilitas Publik.” edited by Ali Hasan Zein and T

Yuliyanti, 1. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2024.

<https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=VsRDEQAAQBAJ>

[&oi=fnd&pg=PP1&dq=+akuntabilitas&ots=QNVP-](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=VsRDEQAAQBAJ)

[ZXTt6&sig=250ro7xYebANnxsqlHlhD7b_8vs&redir_esc=y#v=one](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=VsRDEQAAQBAJ)

[page&q=akuntabilitas&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=VsRDEQAAQBAJ).

5. Skripsi dan Tesis

Rahmadani, Rika. “Analisis Pengelolaan Sampah Di Pasar Kecamatan

Bangkinang Kota.” Skripsi. UIN Suska Riau, 2023.

<https://repository.uin->

[suska.ac.id/80725/1/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/80725/1/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf).

Rosalina, Ririn. “Manajemen Pengelolaan Sampah Di Kabupaten

Bojonegoro.” Skripsi. Universitas Bojonegoro, 2024.

Rustan, Awal Ramadhan. “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.” Skripsi. IAIN Parepare, 2025.
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11171/1/19.2600.004.pdf>.

6. Dokumen dan Laporan Pemerintah

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Persampahan Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 2023.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro. *Rencana Strategis Dinas*

Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029.

Bojonegoro: DLH Kabupaten Bojonegoro, 2025.

<https://drive.google.com/file/d/1OkHQzy-1Xr7Ql95uzdpgFaBu8STDPpSW/view>.

7. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Narasumber Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, 20 Mei 2026.